BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana pemaparan yang telah penulis jabarkan pada beberapa sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagai upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor Kendari, didasarkan pada tuntutan jaksa penuntut umum melalui pertimbangan majelis hakim. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana korupsi diantaranya adalah jumlah kerugian negara yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan, cara perbuatan melanggara hukum dilakukan, dampak dari perbuatan hukum tersebut, hal yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.
2. Upaya penegakan hukum kasus korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari yang didasarkan pada putusan hakim nomor 21/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Kdi dan nomor 22/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Kdi secara tinjauan hukum islam tidak bertentangan dengan penegakan jarimah dalam islam. Mulai dari metode hakim dalam memutus perkara, penerapan hukum oleh hakim, dan hukuman yang disanksikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini, maka akan direkomendasikan butir saran terkait dengan upaya penegakan hukum kasus korupsi di pengadilan Tipikor Kendari, yakni sebagai berikut:

1. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kendari harus memberikan edukasi kepada masyarakat agar bisa memberikan pemahaman dan meminimalisir kecurigaan masyarakat terhadap putusan yang dianggap tidak adil. Khsusnya di kalangan intelektual, pengadilan tindak pidana korupsi kendari menyelenggarakan acara seminar di kampus-kampus dan sekolah-sekolah umum.
2. Upaya penegakan hukum kasus korupsi di pengadilan tindak pidana korupsi sejauh penelitian penulis sudah sesuai dengan nilai-nilai islam. Secara peribadi dan kelembagaan, sangat mendukung penegakan hukum kasus korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kendari. Semoga Pengadilan Tipikor Kendari senantiasa menjaga integritas ini.
3. Dalam hal persidangan kasus tindak pidana korupsi, Pengadilan Negeri Kendari sebagai pengadilan yang di dalamnya terdapat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi agar bisa melaksanakan sidang-sidang korupsi di gedung yang sudah dibangunkan secara khusus untuk menangani semua kasus-kasus korupsi yang beralamatkan di Kecamatan Baruga.